

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Keberhasilan pemerintah dan pembangunan daerah ditentukan oleh penyelenggara pemerintahan daerah yang baik. Pengelolaan keuangan dituntut untuk tertib, transparan dan akuntabel guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (Pujanira, 2017).

Seiringnya perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, maka wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yaitu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Kiranayanti dan Erawati, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, kemudian direvisi kembali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 mengenai Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah, keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia. Nurcholis (2011) menjelaskan bahwa melalui sistem pemerintah daerah, Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak sekedar melaksanakan ketentuan dari pusat tapi membuat rencana, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasinya sendiri. Dalam hal ini pengambilan keputusan berada di daerah, begitu juga tentang pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawabannya.

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran diwujudkan dalam Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) yang terdiri dari, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan (Permendagri No. 64 Tahun 2013). Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam upaya pengambilan kebijakan suatu pemerintahan di masa yang akan datang.

Suwardjono (2008) menyatakan bahwa tujuan utama dalam pelaporan keuangan organisasi non-bisnis seperti unit-unit pemerintahan yaitu untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut. Pemerintah sudah seharusnya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang dibutuhkan berbagai pihak. Peningkatan kualitas laporan keuangan dimaksudkan agar dapat meningkatkan kredibilitasnya, menyajikan informasi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pemakai, dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mendapat penilaian setiap tahunnya berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan setiap Kabupaten/Kota wajib mengirimkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Tahun Anggaran yang berlaku kepada Badan Pengawas Keuangan tepat pada waktunya. Informasi memegang peran yang sangat penting untuk mengetahui kegiatan apa yang telah terjadi, melakukan evaluasi apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan menjamin agar data tersebut dapat diolah secara efisien menjadi informasi yang akurat, dapat dipercaya, dan tepat waktu maka dalam pengolahan data tersebut diperlukan suatu alat yang dinamakan sistem informasi (Zulfah dkk, 2017). Informasi adalah data yang diproses dan pemakai melakukan suatu tindakan yang dapat ia lakukan atau tidak dilakukan (Hall, 2008).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dioptimalkan menggunakan alat bantu teknologi informasi yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi dirancang sedemikian rupa oleh suatu organisasi atau lembaga sehingga dapat memenuhi fungsinya yaitu menghasilkan informasi akuntansi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, dengan sistem informasi akuntansi yang layak dapat dihasilkan suatu laporan yang mampu memberikan berbagai informasi yang berguna bagi pihak-pihak pengambil keputusan. Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi (Bodnar dan Hopwood, 2000).

Pada umumnya tujuan pemanfaatan sistem informasi pada instansi pemerintah lebih menekankan pada tingkat pengurangan kesalahan dalam memproses transaksi yang selama ini dilakukan secara manual dan memberikan informasi laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Pemanfaatan sistem informasi ini dapat digunakan oleh manajemen untuk membuat keputusan, sehingga memberikan dampak yang luar biasa mengingat instansi pemerintah merupakan sektor publik yang paling tinggi tingkat ketergantungannya pada aktivitas-aktivitas pengumpulan, pemrosesan (Rama dan Jones, 2006).

Sistem Pengendalian Internal diperlukan untuk mendukung terciptanya kualitas dan keyakinan yang memadai atas informasi laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sistem pengendalian internal meliputi keseluruhan organisasi dan semua kebijakan atau ketentuan organisasi yang telah dikoordinasikan untuk melindungi harta, mempertahankan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mengendalikan kegiatan internal.

Penyusunan LKPD harus berdampingkan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP), bahwa tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi organisasi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan (Safridha, 2020). Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah informasi akuntansi keuangan yang berkualitas (Aprilia, 2019).

Struktur pemerintahan daerah, khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, dan aset yang terjadi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam dunia pemerintahan, setiap bagian harus diisi oleh orang yang tepat. Begitu juga pada bagian keuangan yang harus diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam memahami akuntansi dan ilmu-ilmu keuangan yang terkait lainnya. Pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Diani, 2014).

Selain kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi juga diperlukan guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (*goal*) yang ingin dicapai organisasi. Komitmen organisasi akan menimbulkan rasa memiliki pegawai terhadap organisasi, sehingga memunculkan tanggungjawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasi dan termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi. Steers (1988) dalam Dewi (2020) mengatakan, komitmen organisasi menjelaskan kekuatan relatif dari sebuah identifikasi individu dengan keterlibatan dalam sebuah organisasi. Komitmen menghadirkan sesuatu lebih dari loyalitas terhadap organisasi, disamping itu hal ini suatu hubungan yang aktif dengan organisasi dimana individu bersedia untuk memberikan sesuatu dari diri mereka untuk membantu keberhasilan dan

kemakmuran organisasi.

Membangun komitmen dalam organisasi diperlukan untuk mengembangkan dan memelihara informasi akuntansi dalam bagian integral dari pelayanan dan pengambilan keputusan. Dengan adanya komitmen terhadap organisasinya, maka setiap pekerja akan mempunyai tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasinya dan termotivasi melaporkan segala aktivitasnya termasuk dalam hal menjalankan laporan keuangan (Mutiana dkk, 2017). Komitmen organisasi dibangun atas dasar kepercayaan pegawai atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pegawai membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi.

Dapat dilihat dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk wilayah Kota Jambi Tahun 2012 s.d 2020, opini yang diperoleh Kota Jambi dapat dikatakan cukup memuaskan. Ini dikarenakan peningkatan opini yang diperoleh terhadap laporan keuangan pada tahun 2016 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Provinsi Jambi dan bertahan hingga tahun 2020. Namun walaupun Kota Jambi menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tidak menutup kemungkinan adanya temuan atau kelemahan yang terdapat pada Laporan Keuangan Kota Jambi.

Siaran Pers Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 menyatakan bahwa Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada:

1. Kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Kecukupan informasi laporan keuangan;
3. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern; dan
4. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tujuh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut, artinya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kota Jambi dan

Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 telah disajikan secara wajar untuk semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain Opini atas Laporan Keuangan, BPK juga mengungkapkan adanya permasalahan-permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Kota Jambi sendiri, terdapat temuan-temuan yang menunjukkan kualitas laporan keuangan yang masih perlu ditingkatkan adalah sebagai berikut:

- a. Aset Tetap Peralatan dan Mesin tidak dapat ditelusuri rinciannya pada DBMD sebesar Rp7,88 miliar dan minimal sebesar Rp4,94 miliar tidak diketahui keberadaannya;
- b. Kesalahan penganggaran Belanja Modal sebesar Rp43,91 miliar;
- c. Kekurangan volume atas 20 Paket Pekerjaan pada Dinas PUPR sebesar Rp1,47 miliar.

BPK Perwakilan Provinsi Jambi mengatakan bahwa pada tahun 2018 Kota Jambi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, BPK menyebutkan bahwa masih ditemukannya temuan atas kesalahan penganggaran belanja modal sebesar Rp41,61 miliar, pengendalian pembayaran belanja tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD tidak memadai, serta penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tidak sesuai ketentuan. Sedangkan temuan atas kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan diantaranya adalah kekurangan volume pekerjaan atas 29 paket pada dua Perangkat Daerah sebesar Rp1,76 miliar.

BPK Perwakilan Provinsi Jambi kembali menyatakan bahwa Kota Jambi memperoleh opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019. Namun BPK kemudian menemukan kembali kelemahan pengendalian intern dan permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak mempengaruhi secara material kewajaran LK Tahun 2019. Permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Kesalahan Klasifikasi Belanja Modal, Belanja Barang dan Belanja Hibah Dalam Penganggaran dan Realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran;

- 2) Penyajian dan Pengukuran Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan Tidak Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- 3) Penatausahaan dan Penyajian Aset Tetap yang Diperoleh dari Pelimpahan Kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) Bidang Pendidikan Belum Memadai.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK, Kota Jambi kembali meraih opini WTP atas LKPD TA 2020. Atas opini tersebut dikutip dari Siaran Pers BPK menyebutkan bahwa BPK masih menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

1. Penetapan pajak terutang untuk jenis pajak *self assessment* tidak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
2. Pembayaran dan perhitungan Insentif Pemungutan Pajak Daerah tidak sesuai ketentuan dalam PP Nomor 69 Tahun 2010;
3. Pembayaran dan pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada empat perangkat daerah tidak sesuai ketentuan;
4. Kekurangan volume dan kelebihan pembayaran serta pekerjaan tidak sesuai kontrak pada 13 paket pekerjaan Jalan di Dinas PUPR;
5. Pengelolaan BMD berupa Tanah belum memadai dan sah.

Dalam Siaran Pers BPK tersebut, BPK berharap agar hasil pemeriksaan yang telah disampaikan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan secara bersama-sama selalu berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel.

Tabel 1.1
Opini BPK atas LKPD Tahun 2012 s.d 2020
Wilayah Kota Jambi

No	Entitas	Opini								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kota Jambi	WDP	WDP	WDP	TMP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : (www.jambi.bpk.go.id)

Penelitian terkait Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti, Zulfah dkk, (2017) dan Leiwakabessy (2020), ini dilakukan untuk mengetahui apakah Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian Zulfah dkk, (2017) mengatakan bahwa Sistem informasi akuntansi mempunyai hubungan yang kuat dengan kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan hasil penelitian Leiwakabessy (2020) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian terkait Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti, Lestari (2020) dan Leiwakabessy (2020), ini dilakukan untuk mengetahui apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian Lestari (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan hasil penelitian Leiwakabessy (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas LKPD di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Terkait Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan telah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti seperti, Leiwakabessy (2020) dan Qomah (2021), ini dilakukan untuk mengetahui

apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian Leiwakabessy (2020) menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun pada hasil penelitian Qomah (2021) menunjukkan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian terdahulu terkait Komitmen Organisasi dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti: Maksyur (2015) hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, Saifudin dan Rizki (2020) menunjukkan hasil bahwa Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saifudin dan Rizki Nur Aprilia (2020) dengan judul penelitian “Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan sedangkan Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saifudin dan Rizki Nur Aprilia (2020), terdapat satu pembeda pada variabel independen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu Sistem Informasi Akuntansi sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Saifudin dan Rizki Nur Aprilia menggunakan variabel independen Teknologi Informasi. Peneliti memilih menggunakan variabel Sistem Informasi Akuntansi dikarenakan pada beberapa penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Dewi (2020) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Artana (2016) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan

Keuangan. Terdapat juga perbedaan pada objek penelitian yaitu di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi sedangkan pada penelitian Saifudin dan Rizki Nur Aprilia (2020) menggunakan objek penelitian pada OPD Kota Semarang.

Dari hasil uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Jambi)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi?
3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi?
4. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi.

4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi:

1. Bagi peneliti

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan pengetahuan peneliti dalam bidang sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah jika suatu saat berkesempatan bekerja dalam lingkup pemerintah daerah nantinya.

2. Untuk Instansi Pemerintah Kota Jambi

Sebagai bahan informasi pelengkap atau sebagai masukan sekaligus pertimbangan bagi pemerintah Kota Jambi dalam meningkatkan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.